

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Euis Nisa Rosita, Resmi Ranti Rosalina

Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia

Email : [enisarosita54@gmail.com](mailto:enisarosita54@gmail.com) , [resmi.ranti@gmail.com](mailto:resmi.ranti@gmail.com)

### ABSTRACT

*Regional financial statement are very important for government budget planning. Research it aims to examine the influence of information system and accounting standards in the sector government to get accountability of good financial statements. The method that used in research, namely qualitative approach with systemactic literature review, this study reviews several numbers that has an accountable relationship of regional financial statement (y) in the government sector as a dependent variable, and the application of the financial management information system regional (x1) and government accounting standars (x2) as independent variables. Result of research show that 8 out of 10 journal articles have a positive influence on regional financial management information system (SIPKD) variables and accounting standards government (SAP) on financial statement accountability regional. While 2 journal article other got a positive influence on a variable x1 and non-positive influences on variable x2.*

**Keyword:** SIPKD , SAP , Financial Statement Regional

### ABSTRAK

Laporan keuangan daerah sangat penting bagi perencanaan anggaran pemerintah. Tujuan riset ini ialah untuk menganalisis bagaimana lembaga pemerintah dapat memperoleh manfaat dari teknologi informasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang mendorong pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi kualitatif berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif dipakai dalam penelitian ini, riset ini meninjau beberapa jurnal yang mempunyai hubungan akuntabilitas laporan keuangan daerah (y) pada sektor pemerintah sebagai variabel dependen, dan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (x1) dan standar akuntansi pemerintah (x2) sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 artikel jurnal mendapat pengaruh positif pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) kepada akuntabilitas laporan keuangan daerah, sementara 2 artikel jurnal lain mendapat hasil pengaruh positif pada variabel x1 dan tidak positif pada variabel x2.

**Kata Kunci :** SIPKD, SAP, Laporan Keuangan Daerah

### PENDAHULUAN

Sistem informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap fungsional organisasi. Instansi pemerintah saat ini sangat bergantung pada infrastruktur TI dan sistem informasi berbasis komputer untuk menjalankan misinya. Semua itu merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi informasi sektor keuangan buatan pemerintah (Farhan<sup>1</sup> & Rahayu<sup>2</sup>, n.d.).

Informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya yang saling berhubungan harus dikelola agar dapat dipakai dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum melalui Permendagri nomor 70 Tahun 2019. Pelaporan keuangan yang akurat, akuntabilitas, dan keterbukaan memerlukan pemanfaatan teknologi Informasi. Pemerintah juga terlibat dalam pembuatan perangkat lunak untuk dipakai di bidang keuangan dan akuntansi, perangkat lunak ini dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah (SIPKD). Karakteristik kualitatif

laporan keuangan pemerintah, seperti relevansi, keandalan, daya banding, dan pemahaman, merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan supaya laporan keuangan pemerintah dapat terpenuhi kualitas yang diinginkan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Banyak yang melakukan penelitian tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) kepada akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Namun belum ada penelitian *systematic literature review* yang serupa yang dilaksanakan dalam fokus mengetahui ada tidaknya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan kepada akuntabilitas laporan keuangan daerah sampai saat ini.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait “**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah**”, maka dilaksanakan kajian tersebut. Penulis mengajukan pertanyaan seberapa besar SIPKD dan SAP telah mengubah tanggung jawab pelaporan keuangan daerah. Tujuannya riset ini ialah untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan SIPKD terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Temuan riset ini diharapkan dapat dipakai dalam dua cara: (1) sebagai bahan kajian pemerintah atau sektor publik, dan (2) sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## LANDASAN TEORI

### Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berdasarkan efisiensi, keekonomian, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan beragam peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD, program SIPKD merupakan instrumen yang bermanfaat (Lotu, 2022).

Selain menunjukkan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam membantu pemerintah daerah, aplikasi ini memberikan contoh langkah nyata yang dilaksanakan untuk memudahkan mereka dalam menafsirkan dan menerapkan beragam peraturan perundang-undangan yang berhubungan kepada pengelolaan keuangan daerah.

### Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan kesehatan keuangan suatu entitas diartikan sebagai “laporan keuangan terstruktur terkait posisi keuangan dan transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelapor,” sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan pelaporan keuangan dan tuntutan masyarakat yang akan membaca laporan tersebut dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan memberikan opini tahunan kepada kualitas laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan (Kuntadi et al., 2022), ketersediaan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat membantu mengatur sumber daya manusia atau otoritas daerah dalam membuat laporan keuangan, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari buruknya ketergantungan informasi keuangan.

### Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Tingkat akuntansi SKPD dan PPKD mengarah pada laporan keuangan sebagai produk akhir dari suatu laporan. Laporan keuangan entitas pelapor ialah laporan terstruktur terkait situasi keuangan dan transaksi entitas pelapor. Pengguna laporan di pemerintah daerah, antara lain pemerintah, wajib pajak, investor, pakar, pimpinan, dan pelaksana manajemen pemerintah daerah, mempunyai kepentingan untuk mengambil keputusan yang relevan dan dapat memperoleh manfaat dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terkait posisi keuangan entitas, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, diperlukan indikator akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Menurut penelitian (Zeny Antika et al., 2020), orang-orang yang bertugas mengelola sumber daya publik perlu bertindak secara bertanggung jawab. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang benar-benar berminat terhadap data yang dihasilkan

oleh penyelenggaraan keuangan pemerintah berhak mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan tersebut.

Menurut (Surjono & Nova Roslina Firdaus, 2017), media akuntabilitas berkala adalah tugas untuk mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kewajiban ini dapat dikatakan sebagai kewajiban untuk menerima tanggung jawab atas berhasil tidaknya misi organisasi. Dalam buku (Mardiasmo, 2002), pemerintah mempunyai empat dimensi tanggung jawab yang berbeda dalam laporan keuangan daerah. Berikut beberapa faktor tersebut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*Proccess Accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

## METODOLOGI

### Metode Penelitian (*Design Research*)

Riset ini memakai pendekatan kualitatif yang berpedoman pada postpositivisme untuk menganalisis fenomena alam dengan peneliti sebagai alat utama (Sugiyono, 2013) dengan metode SLR (*Systematic Literatur Review*). *Systematic literature review* atau biasa disebut juga penelitian kepustakaan yang disajikan secara sistematis. Analisis literatur review merupakan suatu metode yang sistematis, eksplisit, indentifikasi dan evaluasi dalam tulisan hasil riset yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. *Systematic literature review* dilaksanakan dengan cara yang tidak biasa, dapat direproduksi untuk memberikan bukti untuk praktik dan pembuatan kebijakan kemudian untuk mengidentifikasi kesenjangan didalam penelitian (Muhammad Syukri N, 2020)

### Sumber dan Pengumpulan Data Penelitian (*Search Proccess*)

Riset ini disusun dengan memakai sumber data sekunder, artinya bahan yang dipakai tidak diperoleh melalui metode pengumpulan data primer melainkan berasal dari riset yang dilaksanakan oleh akademisi lain. Metode dokumentasi dipakai untuk memperoleh data yang diperlukan, termasuk penggalan rincian terkait secara metodis dari riset yang diterbitkan sebelumnya.

Syamsul Hadi, (2020) Menuturkan bahwa dalam pengumpulan data belum ada kesepakatan secara umum tentang seharusnya berapa tahun terakhir dalam melakukan *systematic review*. Namun pada pengumpulan data dapat memakai pencarian artikel dengan *digital library* dan penggunaan *keyword* untuk memungkinkan generalisasi fokus pada area topik penelitian. Prosedur penyaringan yang disebut "inklusi dan eksklusif" dipakai dalam proses pemilihan sampel untuk memastikan bahwa hasil riset yang dipilih untuk tinjauan literatur sistematis memang merupakan temuan dari riset yang mempunyai fokus yang selaras terhadap permasalahan penelitian.

### Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Kebutuhan subjek penelitian berikut ini dapat menjadi landasan untuk rumusan pertanyaan riset ini sebagai jawaban kepada kriteria tersebut:

RQ1 : Apa saja faktor – faktor yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

RQ2 : Metode apa saja yang dipakai dalam penelitian SIPKD dan SAP terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

RQ3 : Apa saja permasalahan atau isu yang ditemukan dalam penelitian SIPKD dan SAP terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

RQ4 : Bagaimana hasil dari penelitian SIPKD dan SAP terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

RQ5 : Manakah jurnal yang paling signifikan dalam penelitian SIPKD dan SAP terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

### Kriteria Batas dan Masukan (*Inclusion dan Exclusion Criteria*)

Pada tahap ini, kriteria dalam penelitian ditentukan agar data yang disajikan layak atau tidak untuk dimanfaatkan dalam *systematic literature review*. Kriteria yang tentukan yaitu sebagai berikut :

1. Rentan waktu yang dicari dalam riset yaitu antara tahun 2017-2022
2. Data diperoleh dari jurnal *google scholar* dalam website [scholar.google.com](https://scholar.google.com)
3. Data yang akan dikaji hanya yang berhubungan dengan penelitian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ( SIPKD ), standar akuntansi pemerintah ( SAP) dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
4. Kata kunci yang dipakai dalam riset ini yaitu , SIPKD, SAP, dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

### Kualitas Penilaian (*Quality Assesment*)

Pada tahap ini, data yang dikaji dalam *systematic literature review* kemudian dievaluasi terhadap kriteria penilaian mutu, antara lain sebagai berikut :

Q1 : Apakah *systematic literature review* jurnal akan diterbitkan pada rentan waktu tahun 2017 – 2022 ?

Q2 : Apakah *systematic literature review* jurnal mengkaji tentang SIPKD , SAP dan akuntabilitas laporan keuangan daerah ?

Q3 : Apakah SIPKD, SAP dan akuntabilitas laporan keuangan daerah akan diterbitkan di jurnal professional ?

### Peta Pikiran

Peta pikiran bertujuan untuk memksimalkan peneliti dalam mengkaji dan mengetahui isi pemikiran yang ada.



Sumber : Data diolah penulis, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Analisis

Pada kesempatan ini kita akan melihat datanya, mengambil beberapa kesimpulan tentang hubungan antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian (RQ) dan penilaian kualitas (QA) yang kami tetapkan di awal proyek.

### Hasil dari RQ1 : Faktor – Faktor Yang Memengaruhi

Berdasarkan hasil *research question 1* pada *systematic literatur review* ini di temukan beberapa faktor yang memengaruhi dalam penerapan SIPKD dan SAP terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Didapatkan hasil kategori faktor yang memengaruhi SIPKD, SAP dan akuntabilitas laporan keuangan diantaranya pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan yang jika dilihat dari tabel menjadi faktor paling signifikan dalam penelitian-penelitian tersebut. Selanjutnya faktor pemanfaatan teknologi informasi menjadi kategori kedua yang paling signifikan. Hal tersebut berkesinambungan dengan *systematic literature review* yang dikaji dalam riset ini yakni tentang sistem informasi pengelolaan keuangan dan standar

**Tabel 1. Fakor Yang Memengaruhi**

No	Faktor yang Memengaruhi	Peneliti	Jumlah
1	Sumber Daya Manusia	(Lotu, 2022), (Manajemen et al., 2020), (Farhan <sup>1</sup> & Rahayu <sup>2</sup> , n.d.)	3
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	(Manajemen et al., 2020),(Farhan <sup>1</sup> & Rahayu <sup>2</sup> , n.d.), (Lotu, 2022) ,(Utama, 2021),(Sakti et al., n.d.),(Lesmana, 2021),(Surjono & Nova Roslina Firdaus, 2017)	7
3	Pemahaman Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan	(Manajemen et al., 2020), (Makalag et al., 2023), (Farhan <sup>1</sup> & Rahayu <sup>2</sup> , n.d.),(Lotu, 2022),(Utama, 2021)(Lesmana, 2021),(Zeny Antika et al., 2020),(Surjono & Nova Roslina Firdaus, 2017),(Mokoginta et al., 2017)	9
4	Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja	(Utama, 2021), (Lesmana, 2021),(Mokoginta et al., 2017)	3
5	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	(Manajemen et al., 2020), (Sakti et al., n.d.),(Zeny Antika et al., 2020),(Mokoginta et al., 2017)	4

Sumber : Data diolah penulis, 2023

### Hasil dari RQ2 : Metode Yang Dipakai

Dalam *Research Question 2* dikaji apa saja metode yang dipakai dalam riset yang dipakai dalam *systematic literatur review* ini. Dari 10 artikel jurnal yang ditinjau pada penelitian ini, terdapat seluruhnya memakai metode kuantitatif dengan analisis data seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji lineraritas, uji heterosdisitas, serta uji regresi sederhana bagi yang memakai 1 variabel independen dan dipakai uji regresi linier berganda untuk menguji lebih dari 2 variabel independen. Kemudian dalam metode pengumpulan data, seluruhnya juga menyebar kuisisioner kepada responden dengan perhitungan sample selaras terhadap kebutuhan untuk kemudian diolah memakai uji data statistik.

**Tabel 2. Metode Yang Dipakai**

No	Peneliti ( Tahun )	Judul Penelitian	Metode
1	Fitria N. Makalang , Janthe J.Tinangon dan Dhullo Afandi (2019)	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”	Kuantitatif

2	Muhammad Farhan dan Sri Rahayu (2019)	“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan dan Kualitas laporan Terhadap Kesuksesan SIKPD”	Kuantitatif
3	Martha Nathasya Lotu(2022)	“Pengaruh Penerapan SIPKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”	Kuantitatif
4	Etik Winarmi , Endah Tri Kurniasih , Ahmad Soleh	“Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM,Penerapan SAP, Penerapan SPIP, dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik dan Kualitas Laporan Keuangan”	Kuantitatif
5	I Kadek Indra Utama (2021)	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar”	Kuantitatif
6	Bima Sakti Anggoro Putra,Hero Priono(2022)	“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”	Kuantitatif
7	Hendra Lesmana(2021)	“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasar Batang”	Kuantitatif
8	Zeny Antika, Yunika Murdayanati, Hafifah Nasution(2020)	“Pengaruh Sistem Akuntansi Daerah , Aksesibilitas laporan Keuangan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	Kuantitatif
9	Welly Surjono , Nova Roslina Firdaus(2017)	“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan( DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”	Kuantitatif
10	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh(2017)	“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”	Kuantitatif

Sumber : Data diolah penulis, 2023

### Hasil dari RQ3 : Permasalahan Atau Isu Yang Ditemukan

Pada *Request Question* 3 tentang permasalahan atau isu yang ditemukan peneliti dalam kajiannya terdapat beberapa hal. Seperti yang dikemukakan oleh (Makalag et al., 2023) bahwa pemerintah daerah mungkin dapat membuat laporan keuangan daerah yang dapat dipercaya jika mereka menerapkan dan secara ketat mematuhi praktik akuntansi yang kompeten. Untuk terpenuhi peraturan akuntansi pemerintahan, pelaporan keuangan daerah harus tepat dan terbuka. Oleh karena itu, sebelum pemerintah daerah atau masyarakat dapat mengandalkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, diperlukan metode pengendalian mutu yang kuat untuk menjamin keakuratan laporan dan terpenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut penelitian (Farhan<sup>1</sup> & Rahayu<sup>2</sup>, n.d.) pemerintah wajib menyajikan laporan keuangannya dengan berbasis akrual dan selaras terhadap standar yang telah ditetapkan. Namun peraturan yang dikembangkan di tingkat regional memiliki batasan dan tidak dapat diterapkan secara global.

Namun (Sakti dkk., n.d.) menemukan kendala yang dihadapi oleh pihak administrasi Pemerintah Kota Denpasar. Permasalahan tersebut adalah pengenalan teknologi informasi yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pegawai. Hal ini juga ditemukan pada BKDS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakannya sesuai prosedur yang telah dibuat; Namun, SKPD tidak mampu memberikan bukti yang jelas terkait hal tersebut. Konsekuensinya, belum jelas apakah penerapan SIPKD mampu meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal di daerah (Lotu, 2022).

(Manajemen dan lainnya, 2020) menemukan beberapa kekhawatiran atau masalah lebih lanjut. Frekuensi diumumkannya temuan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) setelah diterbitkannya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk menilai opini dan kualitas LKPD. Meskipun kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan pembangunan sistem manajemen semuanya sangat penting, terdapat juga beragam faktor tambahan yang berperan. Diperkuat oleh (Sakti et al., n.d.) dan (Mokoginta et al., 2017) tentang kompetensi atau kualitas sumber daya manusia (SDM) dimana (Utama, 2021) menekankan perlunya melakukan kajian lebih lanjut terhadap sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan pemerintah kota Denpasar untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan pegawai Pemerintah Kota Denpasar belum mendapat pembagian pekerjaan selaras terhadap bidang ilmu yang dimilikinya. Begitu pula menurut (Sakti et al., n.d.) dan (Mokoginta et al., 2017) tentang kompetensi atau kualitas sumber daya manusia (SDM) para pegawai yang telah ditugaskan atau diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai.

#### **Hasil dari RQ4 : Hasil Dari Penelitian**

Pada *Request Question 4* terdapat hasil dari riset yang dikemukakan dengan beragam data yang dihasilkan dari uji-uji yang dilaksanakan di tiap penelitian. (Lotu, 2022) penelitiannya menandakan yaitu penerapan SIPKD mempunyai koefisien determinasi sebesar 15% terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 85% ditentukan oleh pengaruh faktor lain. Menurut Lesmana (2021), nilai signifikansi pengujian hipotesis berkisar antara 0,005 hingga 0,05 menandakan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan menguntungkan kepada kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan. Sistem informasi akuntansi bertanggung jawab memengaruhi 81,7% elemen yang dipakai dalam evaluasi kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel lain bertanggung jawab atas 18,3% sisanya. Koefisien korelasi antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas laporan keuangan daerah diperoleh sebesar 0,738 (Surjono & Nova Roslina Firdaus, 2017). Hal ini menandakan yaitu hasil studi menunjukkan arah yang baik dan terdapat besarnya pengaruh antara kedua faktor tersebut. Jika  $K_d$  sebesar 54,46%, maka sistem akuntansi keuangan daerah bertanggung jawab atas 54,46% varians kredibilitas pelaporan keuangan daerah. Sisanya sebesar 45,54% variasi kredibilitas pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pada hal lain dikemukakan oleh beberapa peneliti diantaranya (Makalag et al., 2023), (Farhan<sup>1</sup> & Rahayu<sup>2</sup>, n.d.), (Sakti et al., n.d.), (Zeny Antika et al., 2020), dan (Mokoginta et al., 2017) menyebutkan bahwa semua yang menjadi variabel independen memiliki hubungan atau pengaruh positif terhadap variabel dependennya. Masing-masing melalui hasil perhitungan pengolahan data uji statistik seperti SPSS yang dipakai oleh para peneliti.

Berbeda dengan 5 peneliti yang mendapatkan pengaruh positif dari variabel yang diuji, peneliti (Manajemen et al., 2020) dan (Utama, 2021) justru mendapat 2 hasil yang berbeda dari setiap variabel. Seperti pada riset (Manajemen et al., 2020) Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Jambi dipengaruhi secara positif oleh tata kelola yang baik dan kompetensi SDM, serta penerapan SAP. Sementara itu, berdampak buruk kepada keandalan pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hal ini akan berdampak signifikan dan positif terhadap upaya pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel. Sementara itu, akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah belum membaik. Selain itu, temuan studi

yang dilaksanakan Utama pada tahun 2021 menandakan yaitu penggunaan SAP memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menandakan yaitu kualitas laporan keuangan yang disajikan akan mampu menyampaikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya berbanding lurus dengan seberapa baik pelaksanaannya dilaksanakan. Namun, terdapat kekurangan OPD yang memiliki operator SIPKD yang terlatih dan dapat diandalkan dalam memanfaatkan sistem itu sendiri; Akibatnya, pemasangan SIPKD tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### Hasil dari RQ5 : Jurnal Yang Paling Signifikan

Jurnal yang paling signifikan dalam penelitian *systematic literature review* ini, menggambarkan seluruh artikel jurnal menganalisis tentang penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), standar akuntansi pemerintah (SAP) dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Pada tahun 2017 terdapat 2 artikel jurnal yang membahas penelitian tersebut, tahun 2019 terdapat 1 artikel jurnal, tahun 2020,2021 dan 2022 terdapat masing-masing 2 artikel jurnal, serta pada tahun 2023 ada 1 jurnal.

**Tabel 3. Jurnal Paling Signifikan**

No	Nama Penerbit	Tahun	Jumlah
1	Jurnal EMBA	2023	1
2	e-Proceeding of Management	2019	1
3	Jurnal Akuntansi : Tranparan dan Akuntabilitas	2022	1
4	Jurnal Manajemen dan Sains	2020	1
5	Hita Akuntansi Keuangan	2021	1
6	Jurnal Ilmiah Kakuntansi dan Keuangan	2022	1
7	Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)	2021	1
8	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi	2020	1
9	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan	2017	1
10	Jurnal Akuntansi Going Concern	2017	1

Sumber : Data diolah penulis, 2023

#### Hasil dari QA ( Quality Assesment)

Setelah mendapat beberapa kriteria jurnal untuk menjawab *quality assessment*, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa artikel jurnal dalam riset ini seluruhnya diterima dan layak untuk kriteria *quality assessment*.

**Tabel 4. Hasil Quality Assesment**

No	Peneliti	QA (1,2,3)	Hasil
1	Fitria N. Makalang , Janthe J.Tinangon dan Dhullo Afandi (2019)	Ya	Diterima
2	Muhammad Farhan dan Sri Rahayu (2019)	Ya	Diterima
3	Martha Nathasya Lotu(2022)	Ya	Diterima
4	Etik Winarmi , Endah Tri Kurniasih , Ahmad Soleh	Ya	Diterima
5	I Kadek Indra Utama (2021)	Ya	Diterima
6	Bima Sakti Anggooro Putra,Hero Priono(2022)	Ya	Diterima
7	Hendra Lesmana(2021)	Ya	Diterima
8	Zeny Antika, Yunika Murdayanati, Hafifah Nasution(2020)	Ya	Diterima
9	Welly Surjono , Nova Roslina Firdaus(2017)	Ya	Diterima
10	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh(2017)	Ya	Diterima

Sumber : Data diolah penulis, 2023

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian *systematic literature review* yang dilaksanakan oleh peneliti, *request question 1* sampai dengan *request question 5* mendapatkan hasil pengaruh positif atas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) kepada akuntabilitas laporan keuangan daerah. Teknik analisis data memakai *systematic literature review* bertujuan untuk mengkaji atau membahas terkait signifikansi jurnal, faktor yang memengaruhi, isu atau permasalahan yang terjadi, hasil daripada penelitian serta metode apa yang dipakai dalam pengambilan data.

Setelah melakukan tinjauan atas seluruh artikel jurnal, peneliti menyimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah dapat berjalan dan menghasilkan laporan keuangan daerah yang sempurna apabila ada fasilitas atau pendukung untuk mengelola kedua hal tersebut. Sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal pemerintah, serta tingkat pendidikan dan pengalaman kerja diperlukan agar sistem pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang selaras terhadap standar akuntansi pemerintah.

### Saran

Dalam tinjauan literatur ini, penelitian memiliki keterbatasan yaitu teknik analisis *systematic literature review* biasanya dilandaskan kepada kata kunci terbatas juga memakai database *google scholar* dalam rentan waktu tahun 2017-2023. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat memakai sample yang lebih banyak dan berkembang dengan memperluas *key word* dan menambah referensi lain yang mudah untuk diakses.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Ilmiah :

- Faud, M. (2015). *Pengantar AKuntansi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.  
Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.  
Muhammad Syukri N, A. S. (2020). *Tinjauan Pustaka Sistematis*. Klaten.  
Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.  
Syamsul Hadi, H. K. (2020). *Systematic Review : Meta Sintesis Untuk Riset Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Viva Victory Abadi.

### Peraturan Pemerintah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

### Artikel Jurnal :

- Farhan<sup>1</sup>, M., & Rahayu<sup>2</sup>, S. (n.d.). *THE EFFECT OF SYSTEM QUALITY, SERVICE QUALITY, AND REPORT QUALITY ON SUCCESS OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (Case Study on West Java Provincial Office)*.  
Kuntadi, C., Erika, J., Saragi, M., Syafira, S. I., & Penulis, K. (2022). *PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH*. 3(5).  
<https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5>  
Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1), 29–37. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>

- Lotu, M. N. (2022). dari sini 9. *Jurnal Akuntansi : Tranparansi Dan Akuntabilitas*, 10(2), 79–88.
- Makalag, F. N., Tinangon, J. J., Afandi, D., Penerapan, P., Akuntansi, S., Terhadap, P., Makalag, F. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). *THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT IN REGIONAL FINANCIAL AGENCY AND Jurnal EMBA Vol . 11 No . 1 Maret 2023 , Hal . 1308-1318*. 11(1), 1308–1318.
- Manajemen, J., Magister, P., Universitas, M., Kualitas, D., Keuangan, L., Kota, P., Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). *J-MAS*. 5(2), 289–295. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>
- Mokoginta, N., Lambey, L., Pontoh, W., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Sakti, B., Putra, A., & Priono, H. (n.d.). Pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Fair Value :JurnalIlmiahAkuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Surjono, W., & Nova Roslina Firdaus, N. (2017). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1). <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737>
- Utama, I. K. I. (2021). 1577-Article Text-3523-1-10-20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 492–513.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>